



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP
PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DI KOTA PARIAMAN**

OLEH :

HENDRO WAHYU BASKORO
BP 04 153 012

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**PADANG
2009**

ABSTRAK

Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional adalah dengan fokus pada penerimaan dari sektor pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kota Pariaman terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan dan dilakukan kepada 40 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Pariaman dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP per tahun. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Pariaman tergolong paham, dengan tingkat pemahaman 60,92%, sedangkan sisanya 39,08% wajib pajak orang pribadi di Kota Pariaman kurang paham.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada awalnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi dan gas (migas). Namun dengan terjadinya resesi dunia dan situasi moneter internasional yang tidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 80-an telah menyebabkan berkurangnya kontribusi migas dalam penerimaan negara. Terjadinya situasi ini, membuat pemerintah sadar bahwa penerimaan negara tidak bisa lagi sepenuhnya digantungkan pada sektor migas ini. Pemerintah harus segera mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada saat itu adalah mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, pada tahun 1983 pemerintah melakukan gerakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), yakni dengan melakukan perombakan secara total pada peraturan-peraturan di bidang perpajakan.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Pada saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama disamping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama di Indonesia untuk beberapa tahun kedepan akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi, maka pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang dibidang perpajakan.

Salah satu dari undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga, dan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Perubahan undang-undang tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Pemberlakuan Undang-Undang No. 16

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap perturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Dengan cara membagikan kuisioner kepada para responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh dikota pariaman sebesar 60.92%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakn. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karna hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%. Dan dari ketiga variabel yang diteliti terdapat perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap masin-masing variabel. Dimana tingkat pemahaman wajib pajak tentang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak lebih baik daripada tingkat pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan PPh yaitu sebesar 77.08%. Sedangkan pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh paling rendah yaitu hanya sebesar 54,16%.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Dircktorat Jenderal Pajak. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imelda. 2004. *Study Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Pariaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Risman, Muhammad. 2006. *Analisis Tingkat Pemahaman Mengenai System Self Assesment, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Pelayanan Informasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Rosdiana, Haulan dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Bussines*. Edisi Keempat. Jakarata: Salemba Empat.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *"Perpajakan Indonesia"*. Jakarta: Salemba Empat.